

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi pada saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk teknologi informasi pada bidang keuangan, terutama pada pengelolaan keuangan sektor publik khususnya pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah akan berupaya dalam mewujudkan *good governance* melalui pengelolaan keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel salah satunya dengan memberikan informasi kepada publik berupa laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah dapat yang berkualitas adalah laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Laporan keuangan merupakan hasil dari *input*, yang diproses dengan baik sampai dengan tahap menghasilkan *output*, sehingga dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan faktor pendukung yang salah satunya adalah berupa penerapan sistem informasi. Sistem informasi akuntansi merupakan sub-sub sistem atau komponen berbentuk fisik maupun nonfisik yang saling terhubung dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Susanto, 2017: 72). Sistem informasi akuntansi dalam pemerintahan daerah berupa *software* atau aplikasi akuntansi yang telah didesain khusus untuk mempermudah proses pengolahan

data keuangan daerah dan diharapkan dapat menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta menciptakan *good governance*.

Penilaian kinerja sistem informasi akuntansi dalam hal ini sistem informasi akuntansi yang ada dalam Pemerintahan Daerah penting dilakukan untuk melihat sejauh mana sebuah sistem dapat menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan memberikan manfaat yang optimal bagi Organisasi (Yasa, dkk (2020). Berdasarkan penelitian Luciana & Irmaya (2006) dalam Tri Lestari (2017), faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi adalah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, kemampuan teknis personal, ukuran organisasi, dukungan manajemen puncak, formalisasi pengembangan sistem informasi, program pendidikan dan pelatihan, keberadaan dewan pengarah, dan lokasi departemen.

Faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa teori. Faktor yang memengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi jika dilihat dari sudut pengguna adalah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem. Menurut Susanto (2017: 369), efektivitas setiap aplikasi komputer dipengaruhi oleh keterlibatan pengguna dalam proses perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi. Partisipasi atau keterlibatan pengguna dalam perancangan dan pengembangan sistem informasi akuntansi lebih ditekankan pada bagaimana peranan pengguna dalam proses perancangan sistem informasi akuntansi dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam mendukung dan mengarahkan kontribusinya, sehingga partisipasi pengguna dalam proses pengembangan sistem akan meningkatkan keberhasilan suatu sistem informasi akuntansi.

Pengguna yang memiliki kemampuan khusus dalam menganalisis sistem yang ada, mengembangkan, dan membantu menyelesaikan permasalahan yang

berkaitan dengan sistem informasi akuntansi, dapat disebut sebagai analisis sistem (Susanto, 2017: 314). Dalam mengembangkan kemampuan khusus tersebut selain berdasarkan kualifikasi khusus dalam bidang pendidikan, pengguna atau analisis sistem perlu mengikuti program pelatihan mengenai standar pengembangan sistem seperti standar sistem *database*, komunikasi data, metode-metode pengembangan sistem informasi akuntansi, dan bagaimana dalam menyusun suatu sistem informasi akuntansi yang layak dan berkualitas dari segi biaya dan manfaat (Susanto 2017: 316).

Kesuksesan penerapan suatu sistem informasi akuntansi sangat erat kaitannya dengan pengguna yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi. Pengimplementasian sistem informasi akuntansi tidak dapat dinyatakan berhasil apabila tidak memberikan manfaat bagi Instansi dan pengguna sistem informasi gagal untuk berkontribusi kompetensi atau kemampuan teknis yang dimiliki. Menurut Ward & Peppard (2002) dalam Puspitawati (2021: 96), dalam meningkatkan kesuksesan penggunaan sistem informasi akuntansi, maka diperlukan pengembangan tingkat kompetensi atau kemampuan teknis pengguna dalam mengelola dan menggunakan sistem informasi akuntansi. Sejalan dengan Gelinnas & Dull (2008) dalam Puspitawati (2021: 96) yang menyatakan bahwa efektifitas sistem informasi akuntansi dapat terwujud apabila pengguna memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses pengembangan sistem.

Salah satu lingkungan organisasi yang berdampak pada penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di Instansi adalah Dukungan manajemen puncak. Pernyataan tersebut didukung oleh Olson (2003) dalam Puspitawati (2021: 146) yang menyatakan bahwa dukungan manajemen telah berulang kali ditemukan oleh para peneliti sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi. Dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting dalam kesuksesan pelaksanaan sistem informasi akuntansi. Sejalan dengan Sheth (2010) dalam Puspitawati (2021: 146) yang menyatakan bahwa

dukungan manajemen puncak merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap implementasi sistem informasi akuntansi serta dalam menentukan titik keberhasilan dan titik kegagalan dalam kelangsungan suatu organisasi.

Bentuk implementasi sistem informasi akuntansi yang ada dalam Pemerintah Daerah adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta rancangan APBD dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD. SIPD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah meliputi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dimulainya tahun anggaran 2021, seluruh daerah di Indonesia diwajibkan untuk mulai menerapkan SIPD. SIPD dianggap lebih sederhana, mudah dipantau, mudah diawasi dan transparan. Selain itu, SIPD memudahkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pemerintahan (hulondalo.id; 26 Oktober 2020). Namun dalam pengimplementasiannya, SIPD masih mengalami beberapa kendala yaitu implementasi SIPD yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 belum berjalan secara maksimal. Regulasi terkait keuangan daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih bermasalah baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya sehingga membuat daerah mengalami kendala dalam menyesuaikan menu program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD. Akibatnya, pelaksanaan pencairan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2021 di beberapa daerah mengalami keterlambatan (infoanggaran.com; 26 Februari 2021).

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku Instansi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan serta penyiapan bahan rancangan APBD sesuai Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021, sudah mulai melakukan perubahan terkait penerapan sistem informasi akuntansi yang ada di Kabupaten Jember, yaitu dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Perubahan sistem informasi akuntansi tersebut membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan penyesuaian-penyesuaian ulang terkait data anggaran daerah sehingga berdampak terhadap keterlambatan penyusunan KUA-PPAS dan rancangan APBD (beritajatim.com; 28 November 2020). Pemerintah Daerah Kabupaten Jember akhirnya harus melakukan percepatan proses input data program dan rencana kerja agar terangkum sepenuhnya di RAPBD tahun anggaran 2021 melalui SIPD. Melalui sistem informasi akuntansi yang sudah terintegrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat memantau adanya kesalahan penginputan data seperti yang pernah terjadi sebelumnya yaitu kesalahan penginputan data yang membuat Perangkat Daerah harus melakukan penginputan ulang data dari awal (jemberkab.go.id; 25 Maret 2021).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis bagaimana kinerja sistem informasi akuntansi yang ada di BPKAD Kabupaten Jember dalam menyusun dan melaksanakan APBD, menghasilkan informasi keuangan dan aset daerah yang berkualitas, serta menciptakan *good governance* berdasarkan faktor partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, program pendidikan dan pelatihan, kemampuan teknis personal dan dukungan manajemen puncak. Sehingga judul penelitian ini adalah **“Analisis Determinan Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember ?
2. Apakah program pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember ?
3. Apakah kemampuan teknik personal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember ?
4. Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember ?
5. Apakah partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, program pendidikan dan pelatihan, kemampuan teknis personal, dan dukungan manajemen puncak secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

2. Untuk menganalisis pengaruh program pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
4. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.
5. Untuk menganalisis pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, program pendidikan dan pelatihan, kemampuan teknis personal, dan dukungan manajemen puncak secara bersama-sama terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas teori secara nyata dalam bidang penilaian kinerja sistem informasi akuntansi yang ada pada Organisasi Sektor Publik.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang penilaian kinerja sistem informasi akuntansi pada Organisasi Sektor Publik.

3. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember tentang pengaruh partisipasi pengguna dalam pengembangan sistem, program pendidikan dan pelatihan, kemampuan teknis personal, dan dukungan manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan kinerja operasional Kabupaten Jember serta menciptakan *Good Governance*.